



**LAPORAN PENELITIAN
PENGUATAN PEMBELAJARAN
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN**

JUDUL PENELITIAN

**IDENTIFIKASI POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN SARANA PEMBELAJARAN DI SMPN 1 SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

PENELITI

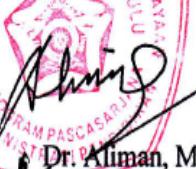
Manap, NIDN 0020055914

**Dilaksanakan atas biaya
Bantuan Penelitian Dosen Program MMP FKIP UNIB
Kontrak No. 295/UN.3/HK/2013 Tanggal 01 - Juli - 2013**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2013**

HALAMAN PENGESAHAN
Hibah Penelitian Penguatan Pembelajaran
Program S2 Manajemen Pendidikan, Tahun 2013

1. Judul Penelitian	: Identifikasi Potensi Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Sarana Pembelajaran di SMP Negeri 1 Sidang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
2. Research Group/Fokus	: Manajemen Pendidikan
3. Ketua Peneliti	<p>a. Nama Lengkap : Dr. MANAP, M.Pd.</p> <p>b. NIP/NIK : 195905201986031001</p> <p>c. NIDN : 0020055914</p> <p>d. Pangkat/Golongan : Pembina, IV/A</p> <p>e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala</p> <p>f. Fakultas/Jurusan : Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Ilmu Pendidikan</p> <p>g. Pusat Penelitian : Universitas Bengkulu</p> <p>h. Alamat Institusi : Jalan W.R. Supratman, Bengkulu, 38371.A</p> <p>i. Telp/Faks : (0736) 21170 / (0736) 342584</p> <p>j. Telp/HP/E-mail/E-mail : <u>0811733454 / msomantri@yahoo.com</u></p>
4. Pembiayaan	<p>Biaya diusulkan tahun 2013 : Rp. 15.000.000,-</p> <p>Biaya yang disetujui Prodi MMP : Rp. 10.000.000,-</p>

Menyetujui.
Ketua,

Dr. Aliman, M.Pd.
NIP 195510231983031001

Bengkulu, 14 Desember 2013
Ketua Peneliti,



Dr. MANAP, M.Pd.
NIP. 195905201986031001

Mengetahui,
Dekan FKIP UNIB

Prof. Rambat Nursasongko, M.Pd.
NIP. 196112071986 01 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah, atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Penelitian ini diilhami oleh permasalahan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, setelah sebagian besar dana pendidikan disalurkan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Penelitian ini berjudul “Identifikasi Potensi Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Sarana Pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Keligi, Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyusun model penguatan manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana pembelajaran di sekolah.

Penelitian ini telah berhasil (1) mengidentifikasi potensi partisipasi masyarakat dalam bentuk potensi internal sekolah; dan (2) potensi ekonomi, sosial, budaya, dan agama; serta (3) mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Keligi, Kabupaten Rejang Lebong.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan model yang dihasilkan dan kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang.

Bengkulu, 14 Desember, 2013
Peneliti,

Manap Somantri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Permasalahan Penelitian	3
C. Kebaruan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Urgensi Penelitian	6
F. Inovasi yang Ditargetkan	6
G. Kaitan Dengan Renstra Universitas Bengkulu	6
H. Luaran Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Manajemen Sekolah Dalam Kerangka Otonomi Daerah	8
B. Implementasi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah	9
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sekolah	10
D. Implementasi Kurikulum 2013	12
E. Pemberdayaan Masyarakat	12
F. Rekam Jejak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	15
G. Paraadigma Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan Penelitian	18
B. Rancangan Penelitian	18
C. Subjek Penelitian dan Pengembangan	20
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	20
E. Indikator Efektivitas Penelitian	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
1. Potensi Sekolah dan Partisipasi Masyarakat	22
2. Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	25
3. Strategi Pelibatan Partisipasi Masyarakat	26
B. Pembahasan Penelitian	27
1. Prioritas Program Pengembangan Sekolah	27
2. Model Penguatan MBS yang Mengutamakan Partisipasi Masyarakat	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
Lampiran-1 : Biodata Peneliti	33

**IDENTIFIKASI POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN SARANA PEMBELAJARAN DI SMPN 1 SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Oleh : Manap Somantri

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian tentang identifikasi potensi partisipasi masyarakat dilakukan terhadap keterlaksanaan program peningkatan sarana pendidikan di SMP Negeri 1 Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dimulai dengan memahami (1) program partisipasi masyarakat, (2) argumentasi program, (3) mensosialisasikan program, (4) membangun kebersamaan dalam merencanakan, menyepakati, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program; serta (5) mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program partisipasi masyarakat.

Penelitian dikemas dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (**research and development**), telah berhasil mendeskripsikan (1) kondisi sosial-ekonomi, serta budaya masyarakat dan kontribusinya guna mendukung implementasi program sekolah; (2) potensi partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan program sekolah dengan menggunakan pendekatan **focus group discussion**; dan (3) telah berhasil mengembangkan model penguatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelingi Kabupaten Rejang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya siap untuk membantu memajukan sekolah, dengan prasarat sekolah mesti melibatkan masyarakat pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Sekolah yang memperhatikan aspirasi masyarakat cenderung mendapat dukungan yang memadai dan dukungan program lanjutan. Tingkat sosial-ekonomi yang tinggi tidak menjamin partisipasi masyarakat jadi baik,

sebaliknya meskipun berasal dari keluarga miskin ternyata dapat memberi dukungan yang berarti, manakala mereka dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan **fokus group discussion** dalam pengelolaan partisipasi masyarakat di sekolah sampel menjadi alasan utama untuk merekomendasikan bahwa perlu pendampingan penguatan pembinaan kompetensi managerial kepala sekolah dan penguatan pelibatan partisipasi bagi komite sekolah.

Kata Kunci:

- 1. Manajemen Berbasis Sekolah**
- 2. Partisipasi Masyarakat**
- 3. Sarana Pembelajaran**

**IDENTIFIKASI POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN SARANA PEMBELAJARAN DI SMPN 1 SINDANG KELINGI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini dinilai semakin menurun, sebagian masyarakat kurang peduli terhadap pendidikan anak di sekolah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh penafsiran partisipasi masyarakat yang kurang tepat, yang biasa dikonotasikan dalam bentuk sumbangan dana. Sementara iuran sekolah saat ini sudah tidak diperbolehkan karena ada BOS. Operasional Sekolah (BOS). Di sisi lain, eporia otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi wahana janji politik bahwa “pendidikan gratis”. Masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.

Dana BOS yang disalurkan ke SD dan SMP sejak Tahun 2005, secara nominal jumlah persiswanya sudah jauh lebih besar dibanding iuran sekolah yang dibayar oleh masyarakat berupa SPP atau BP3. Penggunaan BOS tidak seefektif ketika iuran BP3, karena BOS dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah, dengan kontrol yang kurang memadai dari masyarakat ataupun dari pihak pengawas. Sekolah cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan BOS, menghindari dan menjauh dari peran serta masyarakat. Isu pendidikan gratis semakin memanjakan dan membuat masyarakat bersikap masa bodoh terhadap penyelenggaraan pendidikan, mereka memandang bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.

Implementasi kurikulum 2013 membawa harapan baru untuk menghadirkan proses pendidikan yang lebih nyata, agar peserta tidak tercerabut dari akar budayanya, bahkan menjadi instrumen percepatan pembangunan bagi masyarakat. Kondisi ini terjadi manakala proses pendidikan mendapat dukungan ***stake-holder***. Sallis, 2008;24 mengemukakan bahwa 38% keberhasilan sekolah merupakan kontribusi partisipasi masyarakat. Depdiknas menyebutkan bahwa sekolah yang

didukung partisipasi masyarakat ternyata lebih produktif dan lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah yang dikelola tanpa partisipasi masyarakat (Konsultan; *Basic Education Project*; 2005-2006). Oleh sebab itu, para pihak terkait sebaiknya menata konsep model penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Secara umum masyarakat Bengkulu terdiri dari masyarakat agraris bercorak perkebunan, sebagian besar area pertanian sebelah timur berupa perbukitan di sisi barat pegunungan bukit barisan. Lingkungan alam tersebut mewarnai tata ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda karakteristiknya, sehingga kajian dalam rangka pelibatan partisipasi masyarakat perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan luaran model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan pelibatan partisipasi masyarakat sekitar dalam meningkatkan sarana pembelajaran di sekolah.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang diteliti terkait pengembangan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi program sekolah, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan kualitas sarana pendidikan di SMPN1 Sindang Kelangi, antara lain meliputi:

1. Bagaimanakah kondisi nyata partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelangi;
2. Bagaimanakah potensi faktor sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta peluang kontribusinya untuk mendukung peningkatan sarana pembelajaran di SMPN 1 Sindang Kelangi;
3. Bagaimana model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana pembelajaran di SMPN 1 Sindang Kelangi.

C. Kebaruan Penelitian

Penelitian terdahulu terkait manajemen pendidikan di Bengkulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: (1) Analisis dampak pemberian dana bantuan langsung ke sekolah (Konsultan BEP, 2005); (2) Efektifitas pemanfaatan dana BOS di Bengkulu (Konsultan Manajemen BOS, 2008); (3) Analisis kebutuhan Diklat calon kepala sekolah (Manap, dkk, 2009); (4) Analisis kebutuhan Diklat calon pengawas sekolah (Badeni, dkk, 2009); (5) Pemetaan kompetensi kepala sekolah (Manap, dkk. 2010); (6) Penguatan kompetensi kepala sekolah (Manap, dkk. 2011); Dalam hasil penelitian, kajian, dan laporan kegiatan tersebut antara ada bagian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dapat meningkatkan kinerja sekolah dan mutu pembelajaran di sekolah. Kegiatan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, dikaitkan dengan momentum implementasi kurikulum 2013 dan rencana strategis penelitian unib yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelibatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelangi, Kabupaten Rejang Lebong. Hasil identifikasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan “model penguatan partisipasi masyarakat guna mengimplementasikan program-program sekolah.

Secara lebih rinci penelitian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi partisipasi masyarakat terhadap program peningkatan sarana pembelajaran di SMPN 1 Sindang Kelangi Kabupaten Rejang Lebong; (2) menggali potensi faktor social-budaya dan ekonomi masyarakat guna mendukung peningkatan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelangi; (3) mengembangkan model intervensi untuk penguatan pelibatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelangi, Kabupaten Rejang Lebong.

E. Urgensi Penelitian

Penelitian ini hendak membangkitkan kembali partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang selama ini “nampak makin pudar”. Penyaluran dana BOS serta janji para calon kepala daerah dan calon anggota dewan perwakilan rakyat yang menyatakan “pendidikan gratis” semakin memperparah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. Selain itu, banyak sekolah yang menggunakan pola manajemen tertutup (tidak transparan) dalam pengelolaan dana. Tiadanya transparansi (ketertutupan) dalam pengelolaan dana BOS, telah membuat partisipasi masyarakat “mati suri”. Padahal pengalaman di banyak Negara, dan di sekolah-sekolah yang maju di Indonesia, didukung oleh pendanaan yang memadai, pengelolaan dana secara transparan dan lebih bertanggung jawab, serta mendapat dukungan positif dari *stake-holder*.

F. Inovasi yang Ditargetkan

Pelibatan partisipasi masyarakat mestinya dipandang sebagai metode yang ampuh untuk mengefektifkan dan melipatgandakan sumberdaya yang ada di sekolah. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai “benalu” yang “membebani” sekolah dalam pengelolaan dana. Kuncinya adalah “keterbukaan” (transparansi). Jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana maka tidak akan ada dukungan yang memadai dari para pihak terkait. Keterbukaan akan membuat dana jadi lebih efektif dan lebih efisien, karena pengelolaannya terbuka, kontrol akan efektif, dan apabila terjadi kekurangan dana atau fasilitas sekolah untuk kepentingan pembelajaran maka akan ada pemahaman yang memadai dari pihak terkait untuk membantu sebagian dari masalah yang dihadapi sekolah.

G. Kaitan dengan Renstra Penelitian Unib

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat, dikaitkan dengan implementasi kurikulum 2013 dan rencana strategis penelitian unib yang mengunggulkan pemberdayaan masyarakat. Sebab partisipasi masyarakat termasuk kategori

modal utama pembangunan. Jika pembangunan tanpa partisipasi masyarakat maka akan terjadi pemborosan yang luar biasa, akan terjadi perilaku dan budaya yang kontra produktif dengan pembangunan. Secara teori pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan, maka yang akan terjadi kondisi yang sebaliknya, dimana potensi untuk mensejahterakan orang banyak akan terkooptasi oleh kepentingan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah (satuan pendidikan) dapat dilakukan mulai dari perencanaan kegiatan/ program, implementasi, pembiayaan, dan pengendaliannya.

H. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran berupa:

1. Konsep model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah.
2. Jurnal ilmiah nasional dan/atau Seminar Nasional.
3. Panduan penguatan partisipasi masyarakat bagi kepala sekolah dan komite sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikaji pembahasan (A) Manajemen sekolah dalam kerangka otonomi daerah; (B) Manajemen berbasis sekolah; (C) Pelibatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program sekolah; (D) Misi di balik implementasi kurikulum 2013; dan (E) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Otonomi daerah secara teoritik sesungguhnya bermakna percepatan dan keefektifan dalam pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di masing-masing daerah atau satuan organisasi.

A. Manajemen Sekolah Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dari berbagai hasil studi dan pengamatan di lapangan, antara lain diperoleh simpulan bahwa sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu: (1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran (output) pendidikan, pada kenyataannya masih terlalu berpusat pada masukan (input) dan kurang memperhatikan proses pendidikan; (2) Penyelenggaraan pendidikan secara yuridis dan politis dilakukan secara desentralistik namun pada praktiknya masih berbudaya sentralistik dan birokratik, menyebabkan ketergantungan kepada birokrasi yang terlalu kuat, kebijakan pusat seringkali terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Di samping itu, jika di level sekolah segala sesuatunya terlalu banyak diatur maka akan menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut akan menyebabkan usaha dan daya untuk meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang optimal; (3) peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses pendidikan bagi peserta didik, antara lain peran serta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan proses pendidikan, evaluasi, dan akuntabilitas pendidikan(Depdiknas, 2006). Ketiga

masalah tersebut seringkali menjadi menjadi beban dalam implementasi program sekolah, terlebih bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah “minus”.

Pandangan terhadap sekolah di era otonomi daerah telah bergeser dari posisi sebagai unit pelaksana teknis pusat yang berada di daerah ke unit organisasi terkecil dan mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilannya. Sebagai UPT, sekolah menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dewasa ini fungsi sekolah berubah menjadi unit pengambil keputusan/kebijakan. Hal ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa sekolah itu unik, tidak ada satu sekolah pun yang sama potensi dan permasalahannya. Oleh sebab itu, kebijakan apapun yang akan diambil, dan keputusan apapun yang akan dilaksakan hanya warga sekolah sendiri yang mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka juga yang tahu tidak apa yang tepat untuk memecahkan masalah mereka. Dalam implementasinya, otonomi daerah banyak yang salah orientasi dan salah kelola. Pengambilan keputusan dan perencanaan yang seharusnya dapat dibuat secara cepat dan tepat waktu, pada kenyataannya banyak terhambat oleh adanya berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan misi organisasi.

Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Beberapa perubahan tersebut antara lain berupa: (1) Orientasi manajemen yang lebih berorientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul; (2) Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis; (3) Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang; (4) Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (*boundaryless organization*) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global. Fenomena

ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan (Miftah Thoha, 1999).

B. Implementasi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dijadikan acuan pengelolaan sekolah yang lebih mandiri dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sisdiknas, di banyak sekolah belum dapat diimplementasikan secara benar, bahkan cenderung sebaliknya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rekrutmen kepala sekolah yang kurang transparan, kurang objektif, dan belum berlandaskan pada regulasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang tidak mandiri, bergantung, tidak kreatif, kaku, "penakut", kurang profesional, bersikaf asal bos senang (ABS), menunggu perintah, menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

MBS pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*), yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah. Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada.

C. Patisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sekolah

Sistem pengelolaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, akan menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya selalu menunggu petunjuk dari atas. Desentralisasi pendidikan antara lain bertujuan untuk memberdayakan peranan masyarakat dalam menangani masalah pendidikan. Banyak persoalan pendidikan yang semestinya dapat diatasi oleh masyarakat, tetapi karena iklimnya tidak kondusif maka partisipasi masyarakat tidak terjadi, bahkan dalam

banyak hal, partisipasi masyarakat justru dianggap “tidak diperlukan” karena didasarkan pada pandangan bahwa “pendanaan pendidikan sudah dipenuhi pemerintah pusat melalui BOS. Ada beberapa faktor pendorong perlunya penerapan konsep desentralisasi pendidikan, antara lain dikemukakan Nuril Huda (1999) sbb.:

- tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitasnya;
- ada anggapan bahwa pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik untuk meningkatkan partisipasi siswa bersekolah;
- ketidakmampuan birokrasi untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam;
- kinerja sekolah dinilai tidak sanggup memenuhi tuntutan baru dari masyarakat penggunanya; serta
- tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

D. Implementasi Kurikulum 2013

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu; (1) manajemen berbasis lokasi (*site based management*); (2) pendeklasian wewenang; dan (3) inovasi kurikulum, yang kini direalisasikan dengan sebutan kurikulum 2013. Pada dasarnya manajemen berbasis sekolah dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti pendeklasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di tiap daerah atau sekolah.

Pada kurikulum 2013, pusat menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan tercermin dalam silabus, dan sangat erat kaitannya dengan

program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya mata pelajaran IPA akan diperkaya dengan materi-materi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa Kurikulum 2013 tidak akan berdampak pada terciptanya generasi tukang. Kurikulum baru justru disusun untuk menjawab masalah gersangnya budaya dewasa ini. "Kurikulum 2013 justru didesain untuk mengatasi kegersangan budaya. Akibat kegersangan budaya ini makin banyak yang perilakunya tak berbudaya," kata Nuh di Jakarta, Kamis (28/2/2013). "Jauh dari hanya mencetak tukang saja. Tapi bukan berarti anak-anak yang unggul dalam *technical skill* tidak dibutuhkan," ungkap Nuh. Beberapa waktu lalu, desain kurikulum 2013 dikritik oleh seorang pakar pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh November yang menyebutkan bahwa kurikulum baru hanya akan mencetak generasi tukang. Nuh sebagai pimpinan lembaga yang menggagas kurikulum baru membantahnya. Nuh menduga, asumsi tersebut muncul karena salah persepsi pada landasan desain kurikulum baru. Pasalnya, selama ini kementerian selalu menyebutkan bahwa kurikulum baru ini berlandaskan pada pengembangan *skill*. "Padahal tidak hanya pengembangan *skill*. Ada tiga yang tidak boleh lepas. Pengembangan *skill*, *attitude* dan *knowledge*. Itu harus bersamaan," ungkapnya. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu mengatakan bahwa desain kurikulum ini tidak hanya menekankan pada aspek ilmiah saja. Justru kurikulum baru ini akan lebih kaya dengan nilai-nilai seni budaya dan moral. Salah satu langkah yang diambil adalah menambah durasi mata pelajaran seni budaya dan memberi ruang bagi daerah untuk memasukkan mata pelajaran yang sesuai dengan tradisi kedaerahannya dalam muatan lokal.

E. Pemberdayaan Masyarakat

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masya-rakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional. Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa (Donoseputro, M. Suara Guru-4; 3-6, 1997).

F. Rekam Jejak Penelitian dan Pengabdian

Penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan peneliti utama terkait kekepala-sekolahan, kepengawasan, dan manajemen pendidikan antara lain meliputi: (1) Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Laporan Penelitian, Hibah Program Magister Manajemen Pendidikan, FKIP Unib. (Manap dan Badeni, 2008); (2) Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah. Laporan Penelitian, Hibah Program Magister Manajemen Pendidikan, FKIP Unib. (Rohiat dan Manap, 2008); (3) Pemetaan potensi dan masalah pendidikan di Bengkulu. Penelitian Kebijakan Pendidikan (Manap, Sarwit, Boko Susilo, 2009); (4) Pemetaan kebutuhan dan penyediaan guru di Kota Bengkulu. Penelitian Hibah Pascasarjana, Program MMP FKIP Unib. (Manap dan Puspa Juwita, 2009); (5) Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Hibah Pengabdian pada masyarakat, Program MMP FKIP Unib. (Puspa dan Manap, 2009); (6) Pelatihan calon pelatih kepala sekolah dan pengawas sekolah tingkat nasional dan mendapat sertifikat sebagai Master Trainer bagi pendidikan dan pelatihan kepala sekolah dan pengawas

sekolah. (Manap, 2009; Dirjen PMPTK, Depdiknas, Jakarta); (7) Pemetaan kompetensi kepala SMP di Bengkulu. Penelitian kerjasama antara lembaga penelitian Universitas Bengkulu dengan LPMP Bengkulu. Tahun pertama. Oleh Manap, dkk. (2010); (8) Penguanan kompetensi kepala SMP di Bengkulu. Penelitian kerjasama antara lembaga penelitian Universitas Bengkulu dengan LPMP Bengkulu. Tahun kedua (Manap, dkk. 2011); (9) Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah di Kota Bengkulu. Penelitian penunjang pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Program Magister Manajemen Pendidikan FKIP Unib. (Manap, 2011).

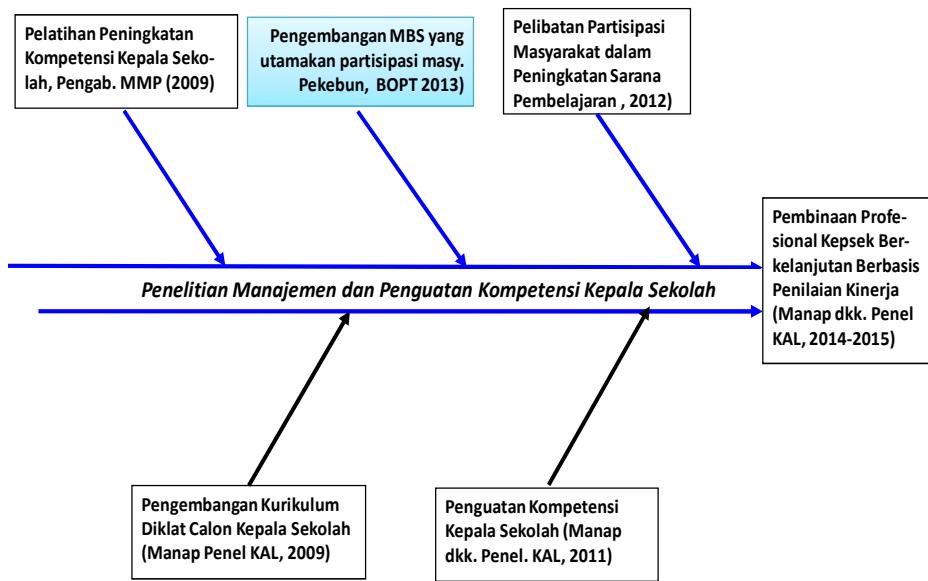
Berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di Bengkulu (Manap, Sarwit Sarwono, dan Boko Susilo; 2009) diperoleh simpulan bahwa penyebaran guru tidak merata, di pusat-pusat kota (Provinsi/Kabupaten) jumlah guru setiap sekolahnya cenderung lebih. Sedangkan di pedesaan dan daerah terpencil kekurangan guru. Di kota, lebih tersedia guru-guru yang berpengalaman dan berprestasi, dan lebih banyak calon kepala sekolah dan kepala sekolah yang memenuhi kriteria.

Dari hasil pemetaan kebutuhan dan penyediaan guru di kota Bengkulu (Manap dan Puspa Djuwita; 2009) diperoleh hasil bahwa pada beberapa bidang studi di beberapa sekolah terdapat **kelebihan** guru dan pada beberapa bidang studi lainnya terdapat **kekurangan** guru, bahkan tiada guru untuk mata pelajaran tertentu. Untuk bidang-bidang yang kelebihan guru pada umumnya disebabkan oleh (1) ketersediaan program studi pendidikan guru di LPTK yang ada; (2) penempatan/ penugasan yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan; serta (3) sebagai dampak negatif otonomi daerah dalam hal pembinaan kepegawaian di daerah lebih “beraroma KKN”.

Terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal pengelolaan BOS, terdapat hambatan yang sangat kuat, dimana partisipasi masyarakat semakin pudar karena isu pendidikan gratis dan larangan terhadap sekolah untuk memungut sumbangan. Masyarakat berpersepsi bahwa semua keperluan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga “merasa tak perlu lagi pelibatan partisipasi masyarakat. Sungguhpun partisipasi dalam pendidikan tidak selalu mesti dalam bentuk pendanaan. Ketika menjadi

konsultan *basic education project (BEP)* peneliti mempunyai pengalaman dalam menggiatkan partisipasi masyarakat. Terdapat bukti bahwa pengelolaan dana *block-grant* yang dijalankan secara terbuka dan partisipatif menjadi lebih efektif dan produktif dibandingkan dengan bantuan yang dikelola secara terutup dan tidak partisipatif. Berikut ini *road-map* penelitian terkait yang dilaksanakan secara simultan oleh peneliti, khususnya yang dilakukan mulai tahun 2008 hingga 2013 dan prospek penelitian lanjutannya (2014-2015).

ROAD MAP PENELITIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DI PROVINSI BENGKULU



Pada rusuk *pish-bond* dikemukakan bahwa penelitian terkait perkembangan (perubahan) dalam kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dimana peneliti telah melakukan beberapa penelitian pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011, yang diakhiri dengan perlunya penguatan partisipasi masyarakat melalui penguatan MBS di daerah perkebunan dan sekitarnya. Sedangkan pada akhir kegiatan akan fokus pada penelitian tentang pengembangan profesional secara berkelanjutan, berbasis penilaian kinerja kepala sekolah, penelitian ini juga merujuk pada arah perubahan kurikulum tahun 2013 hingga tiga tahun ke depan.

G. Paradigma Penelitian

Pengembangan kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Tuntutan perubahan tersebut berdampak ada perlunya penguatan pada pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sekolah, dan manajemen partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, sebagaimana digambarkan dalam Skema-2 (dampak pengembangan kurikulum 2013) di bawah ini.

Skema 2. Dampak Pengembangan Kurikulum 2013

No.	Entitas Pendidikan	Perubahan yang Diharapkan
1	Peserta Didik	Lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Lebih bergairah dalam mengajar Lebih mudah dalam memenuhi ketentuan 24 jam per minggu
3	Manajemen Satuan Pendidikan	Lebih mengedepankan layanan pembelajaran termasuk bimbingan dan penyuluhan Antisipasi atas semaraknya variasi kegiatan pembelajaran
4.	Negara dan Bangsa	Meningkatkan reputasi internasional dalam bidang pendidikan Meningkatkan daya saing Berkembangnya Peradaban Bangsa
5	Masyarakat Umum	Memperoleh lulusan seokah yang kompeten Kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi oleh sekolah Dapat meningkatkan kesejahteraannya

Sumber: Paparan Mendikbud pada Sosialisasi Kurikulum 2013

Melalui pendekatan tersebut diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sedikitnya ada lima entitas, masing-masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen satuan pendidikan, Negara dan bangsa, serta masyarakat umum, yang diharapkan mengalami perubahan. Pada skema 2 di atas menggambarkan perubahan yang diharapkan pada masing-masing entitas.

**MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
YANG LEBIH MENGUTAMAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN SARANA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH**



Sumber: Diadaptasi dari Paparan Mendikbud pada Sosialisasi Kurikulum 2013.

Dalam rangka mendidik peserta didik sehingga mereka menjadi lulusan yang kompeten diperlukan partisipasi masyarakat, terutama dalam rangka peningkatan sarana pembelajaran di sekolah, yang akan menghasilkan lulusan yang lebih produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap berkarakter kuat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud memerlukan identifikasi faktor sosial-budaya dan ekonomi masyarakat. Atas dasar kondisi faktor-faktor tersebut peneliti melakukan intervensi untuk penguatan peran serta masyarakat, serta penguatan manajemen dan budaya sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model manajemen yang tepat untuk peningkatan partisipasi masyarakat pendukung sekolah dimana sekolah berada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pengembangan "model MBS yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat" ini termasuk dalam jenis "penelitian dan pengembangan (**Research and Development**), dan posisinya berada pada fase pertama yaitu pengembangan (**development**). Pada fase ini dilaksanakan (1) identifikasi apa yang sudah dilakukan di sekolah sasaran dalam kontek pelibatan partisipasi masyarakat; (2) potensi sosial, ekonomi, dan budaya (SEB) masyarakat guna mendukung upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Pada saat kajian ditemukan, sinkronisasi pemenuhan kebutuhan sekolah dengan berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung suksesnya program sekolah. Optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap sekolah dapat memberikan dukungan yang sangat berarti bagi tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini fokus pada upaya (1) mengidentifikasi pengelolaan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (2) mengidentifikasi potensi partisipasi masyarakat dan kebutuhan pengembangan sekolah; (3) mengembangkan model manajemen partisipatif bagi sekolah subjek penelitian. Model MBS dimaksud mendapat penguatan pada aspek: (1) penguatan kompetensi kepala sekolah guna penggalian potensi partisipasi masyarakat; (2) penguatan komite sekolah agar mereka berinisiasi dan peduli berpartisipasi terhadap implementasi program sekolah; (3) memadukan antara keunggulan dan kelemahan sekolah dengan tantangan dan peluang dari masyarakat sebagai potensi partisipasi. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan berupa *focus group discussion* yang pesertanya terdiri dari kepala sekolah beserta staf, komite sekolah dan orang tua murid per kelas; dan perwakilan dari murid dari tiap kelas yang ada. Pada forum FGD tersebut dikemukakan keterbatasan, potensi, dan program sekolah; pada saat yang sama juga digali potensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah.

Berdasarkan rancangan penelitian tersebut, secara simultan peneliti telah melaksanakan:

1. Persiapan penelitian

Menidentifikasi sekolah (objek) penelitian yang berminat untuk mengadakan kegiatan penguatan partisipasi masyarakat, terutama pada sekolah-sekolah yang memiliki karakteristik mewakili banyak masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui audiensi dengan 100 kepala sekolah yang berasal dari 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu sebagai informan awal, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2013, bersamaan dengan acara sosialisasi MBS Tahun 2013. Mengajak kepala sekolah sampel yang tertarik dan mau bekerjasama dalam meningkatkan penguatan partisipasi masyarakat untuk merancang kegiatan lanjutan berupa pelaksanaan FGD yang ditata dalam kemasan pengabdian dan penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian melalui *Focus Group Discussion*

Pertemuan dengan warga sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat setempat dan perwakilan orang tua murid di sekolah objek penelitian dekemas dalam bentuk FGD, dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di SMPN 1 Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah dan Wakasek Bidang Kurikulum dan OSIS, Tata Usaha Sekolah, Komite Sekolah, Perwakilan Orang tua siswa, sebanyak 36 orang, dan perwakilan siswa sebanyak 12 orang. Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 54 orang. Pada kegiatan inti ini dilaksanakan:

- a. Mengidentifikasi program sekolah yang sudah dan sedang berjalan dan mendapat dukungan penuh dari warga sekolah dan masyarakat;
- b. mengekspose keseluruhan program sekolah dan memberikan penguatan terhadap program2 yang memerlukan pelibatan partisipasi masyarakat;
- c. gathering partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program sekolah yang dikemas dalam kesepakatan bersama.

3. Perumusan hasil *Focus Group Discussion*

- a. Rumusan program sekolah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan;
- b. Rumusan potensi partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana pembelajaran/pendidikan di sekolah.
- c. Sinkronisasi poin (a) dan (b) dalam bentuk rumusan kesepakatan tentang dukungan terhadap implementasi program sekolah.

C. Subjek Penelitian dan Pengembangan

Subjek penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, yang unturn-unsurnya antara lain diwakili oleh: (1) Unsur sekolah terdiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan bidang kurikulum, serta perwakilan siswa dari setiap kelas; (2) Unsur masyarakat yang terdiri dari Dewan Pendidikan, Pimpinan atau perwakilan dari perusahaan atau kelembagaan sosial masyarakat, Komite Sekolah, Tokoh masyarakat, dan perwakilan orang tua siswa.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini diperlukan: (1) data tentang partisipasi masyarakat yang sudah ataupun yang sedang berjalan sebagai pengalaman terbaik (*best-practice*) serta pengalaman pelibatan partisipasi masyarakat yang kurang memuaskan; (2) data tentang potensi Sosial, Ekonomi, dan Budaya masyarakat yang dapat memberikan kontribusi pada penguatan partisipasi masyarakat; serta (3) data tentang kebutuhan pengembangan dan implementasi program sekolah. Peneliti bertujuan untuk mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat.

Data tentang partisipasi masyarakat diperoleh berdasarkan pengalaman terbaik (*best-practice*) dari beberapa sekolah di Bengkulu; data tentang potensi SEB diperoleh dengan cara mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang positif yang ada dalam masyarakat, dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat; sedangkan data tentang kebutuhan pengembangan dan implementasi program sekolah dapat diperoleh dari dokumen sekolah berupa renstra, rencana

jangka menengah atau Rencana Pengembangan Sekolah (RPS); dan Rencana Kerja Sekolah (RKS) tahunan diturunkan dari dokumen tentang profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, program kerja sekolah, serta laporan pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan sekolah. Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting yang harus mendapatkan perhatian khusus agar terakomodir dalam rencana pengembangan sekolah dan rencana kerja sekolah. Aspirasi yang terakomodir dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi hadirnya partisipasi yang berarti dari masyarakat. Yang sekaligus akan menjadi faktor penentu tingginya partisipasi masyarakat.

E. Indikator Pencapaian

Keberhasilan penelitian ini antara lain diwujudkan berupa (1) deskripsi *best-practices* tentang partisipasi masyarakat; (2) deskripsi potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang kondusif untuk mendukung wujudnya partisipasi masyarakat, yang dapat berupa: (a) kebiasaan hitup bergotong royong; (2) arisan, koperasi atau sejenisnya, (c) strata ekonomi yang nampak pada tingkat penghasilan dan belanja keluarga. Di sisi lain, keberhasilan penelitian juga ditandai dengan hasil analisis RPS, RKS, dan RAPBS yang fokus pada (3) perlunya potensi pengembangan sekolah; (4) peluang program yang layak mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk makalah seminar nasional berjudul “penguatan partisipasi masyarakat dalam pengadaan sarana pembelajaran” serta panduan pelaksanaan focus group discussion dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan inti dalam pengembangan model manajemen berbasis sekolah yang mengutamakan pelibatan partisipasi masyarakat adalah pelaksanaan **focus group discussion**. Hasil yang telah dicapai melalui kegiatan tersebut antara lain berupa: (1) deskripsi potensi sekolah dan pengalaman menghimpun partisipasi masyarakat di sekolah sampel; (2) deskripsi potensi ekonomi, sosial, budaya, dan agama masyarakat, serta peluang partisipasi masyarakat dalam program sekolah; dan (3) program unggulan sekolah dan rancangan pelibatan partisipasi masyarakat.

1. Potensi Sekolah dan Partisipasi Masyarakat

SMP Negeri 1 Sindang Kelingi berada di Desa Sindang Kelingi, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Sekolah dipimpin oleh Yeni Minarni, S.Pd. yang berasal dari penduduk setempat dan alumni sekolah tersebut. Pada saat ini sekolah memiliki 12 kelas, 12 rombongan belajar, 404 siswa dan 28 guru sebagai berikut:

Tabel 1
Data Dasar Sekolah

KELAS	RB	SISWA		
		L	P	JML
VII	4	56	62	118
VIII	4	61	85	146
IX	4	65	75	140
TOTAL	12	182	222	404

GURU	Kelamin		Jumlah
	L	P	
GT/PNS	7	4	11
GTT	5	12	17
Guru Bantu	0	0	0
TOTAL	12	16	28

- a. Waktu Belajar; Semua rombongan belajar belajar pada pagi hari, sore hari digunakan untuk kegiatan ekstra-kurikuler.
- b. Dokumen Sekolah; SMP Negeri 1 Sindang Kelingi memiliki semua dokumen yang diperlukan, walaupun secara kualitas dan akurasinya masih perlu dievaluasi, direvisi,

dan dikembangkan lebih lanjut. Beberapa diantara dokumen yang ada diantaranya adalah: profil sekolah, rencana pengembangan sekolah, rencana kerja sekolah, rencana kerja guru dan tenaga administrasi sekolah, laporan kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah, laporan bulanan, dan laporan semester/tahunan.

- c. Secara fisik sekolah berada pada kondisi yang sangat potensial. Lahan yang luas, tanah yang subur, ruang kelas dan ruang penunjang lainnya sudah memadai. Sekolah memiliki dokumen lengkap, antara lain berupa (1) rencana strategis, (2) rencana pengembangan sekolah, dan (3) rencana kerja sekolah yang sistematik. Namun secara kualitas, dokumen-dokumen tersebut masih alakadarnya, perlu revisi dan penyelarasan antara potensi yang ada dengan aspirasi masyarakat pendukungnya.
- d. Sarana yang dimiliki sekolah belum lengkap, pagar keliling belum memadai, masih ada sisi-sisi sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk “kabur” atau melanggar disiplin, atau terbuka peluang bagi kejahatan terhadap aset sekolah, serta lingkungan sekolah potensial untuk ditata, diserasikan dengan lingkungan sekitar sekolah, dan dioptimalkan pemanfaatannya, terutama pekarangan.
- e. Aktivitas siswa untuk berkreasi, mengembangkan karakter, meningkatkan disiplin, dan meningkatkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik masih terbuka peluang untuk dapat mengadakan pelibatan partisipasi masyarakat secara lebih intensif dan lebih bervariasi. Beberapa aktivitas yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain: *drum-band*, pramuka, PMR, polisi sekolah, kebun biologi, dan sejenisnya.
- f. Pengalaman Partisipasi Siswa/Masyarakat.

Pada tahun 2011/2012 (dua tahun lalu) orang tua/wali siswa SMP Negeri 1 Sindang Kelingi telah menyumbang rata-rata 50.000 rupiah setiap siswa, yang dipergunakan untuk pembelian kursi siswa, karena banyak kursi siswa yang tidak layak pakai.

Dengan sumbangan tersebut siswa dapat duduk di kursi dengan nyaman. Setahun kemudian (2012/2013), orang tua siswa SMP Negeri 1 Sindang Kelingi berhasil membeli peralatan *drum-band*, dengan iuran Rp 50.000,- setiap siswa dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Terbukti, setelah memiliki *drum-band* siswa merasa lebih bangga terhadap sekolahnya, apalagi setelah tim *marching band* mereka berhasil meraih juara-I tingkat Kabupaten, mampu mengalahkan sekolah-

sekolah top yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Prestasi ini telah menginspirasi siswa untuk terus mendukung program peningkatan prestasi sekolah. Pada tahun ajaran 2013/2014 murid-murid SMP Negeri 1 Sindang Kelingi bersepakat untuk membangun musola yang akan dijadikan sebagai fasilitas pelaksanaan ibadah dan pembinaan IMTAQ bagi siswa, mereka sepakat menyisihkan uang jajan mereka sebanyak 500 rupiah setiap harinya atau sebanyak 3.000 rupiah setiap minggunya, untuk itu mereka mendapat persetujuan dari orang tua mereka, dan secara bersama-sama mereka wujudkan impian untuk memiliki mushalla. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, program pembangunan mushalla ini sudah mencapai target sebanyak 60% dari harga yang dicanangkan sebanyak 120 juta rupiah.

- g. Program Unggulan Sekolah; Sekolah memiliki program prioritas dalam bidang peningkatan prestasi akademik, berupa pembinaan tim olimpiade sains. Peningkatan prestasi non-akademik berupa pembinaan olah raga prestasi. Kegiatan ekstrakurikuler berupa pembinaan kelompok *marching-band*, olah raga prestasi, peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, olimpiade sains nasional, usaha kesehatan sekolah, pramuka, olimpiade olah raga dan seni nasional. Sedangkan dalam bidang pembangunan sarana pembelajaran berupa pembangunan aula, areka kegiatan out-dor, dan pembangunan mushalla sebagai sarana peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa. Sekolah ini memiliki pekarangan yang luas dan berada di daerah yang subur, sehingga berpotensi untuk dijadikan sekolah model dengan keunggulan untuk pembudidayaan tanaman pangan.
- h. Kesan dan Pendapat Siswa Tentang Sumbangan; Siswa SMP Negeri 1 Sindang Kelingi berpendapat bahwa: mereka senang dan bangga dapat membantu menciptakan sekolah jadi lebih baik, perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sekolah dilakukan secara terbuka, aspiratif, dan sukarela. Pungutan juga dilakukan secara adil, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak dikutip. Tak banyak siswa yang merasa keberatan, seluruh wakil siswa menyatakan bahwa mereka akan mendukung kegiatan sejenis di tahun-tahun yang akan datang. Memang ada sebagian kecil siswa yang “enggan” menyumbang sebagaimana telah menjadi kesepakatan, tetapi setelah dibahas di masing-masing kelas mereka pada umumnya melmenuhi iuran sebagaimana mestinya.

2. Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

a. Penghasilan Keluarga dan Pemanfaatannya; Penghasilan keluarga rata-rata di bawah 1 juta rupiah atau dibawah upah minimum regional provinsi, tidak menyurutkan mereka untuk iuran dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Penghasilan tersebut secara umum 50% digunakan untuk pangan keluarga, 10% perawatan rumah, 25% transportasi dan kredit motor, 5% keperluan sekolah (seragam, transpot, jajan, buku), 5% biaya listrik, dan 5% untuk biaya lain-lain.

b. Kepengurusan komite sekolah SMP Negeri 1 Sindang Kelingi sudah 2 tahun banyak tidak aktif lagi, pembentukan pengurus baru belum diadakan, hingga dalam acara focus group discussion pada tanggal 26 oktober 2013 telah berhasil membentuk kepengurusan komite sekolah yang baru dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Salim (Ketua Komite Sekolah, terpilih kembali)

Wakil : Holtua Gultom (Guru Senior SMPN 1 Sindang Kelingi)

Bendahara : 1. Amin Aladin, 2. Sutri Suharni

Sekretaris : 1. Siti Aminah, 2. Heri

Anggota: (1). Elmita, (Kelas 1-Unggul); (2). Safaritun, (Kelas 1-A); (3) Ramina, (Kelas 1-B); (4). Ruslan, (Kelas 1-C); (5) Etin, (Kelas 2-Unggul); (6) Indra, (Kelas 2-A); (7). Mistia, (Kelas 2-B); (8) Poniyem,(Kelas 2-C); (9) Ariyanto (Kelas 3-Unggul); (10) Imon, (Kelas 3-A), (11) Mega, (Kelas 3-B); dan (12) Sutiman, (Kelas 3-C).

Dengan demikian FGD dapat pula menghasilkan pembentukan pengurus baru, membangun semangat baru, dan komitmen baru.

c. Budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat masih berlangsung baik, nampak pada acara hajatan keluarga, kegiatan koperasi, arisan, ronda atau siskamling, dan lainnya.

d. Dalam hal seni budaya mereka berpendapat bahwa seni budaya lembak sebenarnya ada yang patut dilestarikan seperti tari-tarian daerah lembak (tari persembahan, tarian dan musik pengiring pengantin) yang sudah jarang diadakan, sebaiknya diangkat lagi melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.

e. Dalam hal kerajinan produktif yang potensial adalah mengembangkan keterampilan pemanfaatan lahan sekolah yang cukup luas dan potensial, atau pembudidayaan

tanaman dalam pot, dan penanganan pasca panen. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan pada siswa, dan dapat mendukung pertumbuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mereka memandang bahwa pertanian potensial untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat (Wali Siswa, Curup, 25 Oktober 2013).

- f. Secara umum masyarakat Kecamatan Sindang Kelingi beragama islam, sedikit sekali yang beragama non muslim. Hal ini berpotensi untuk penyelenggaraan kegiatan yang berbasis pada pembinaan keagamaan. Terbukti dengan sedang berlangsungnya pembangunan mushalla pada tahun ini, setelah mushola ini terbangun, akan diadakan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan di mushola, antara lain baca tulis alqur'an, metode iqra atau bil-qolam. Kegiatan lain yang dapat dilakukan di mushola, seperti pengajian remaja, dewasa, ibu2 dan sejenisnya. Masyarakat meminta agar semua anak muslim dapat menulis dan membaca al-qur'an secara baik dan benar.
- g. Dukungan masyarakat terhadap program sekolah cukup kondusif, bukti dukungan antara lain atas kehadiran komite sekolah sebanyak yang diundang semuanya memenuhi undangan, walaupun ada diantaranya diwakili oleh kakak kandung dan nenek kandung dari siswa, tetapi semuanya mengerti maksud kehadiran dan partisipasinya. Bentuk dukungan masyarakat antara lain berupa: (1) sumbangan sukarela dari wali murid dan dukungan kepada siswa untuk menyisihkan uang jajan mereka sebanyak 500 rupiah setiap hari; (2) sumbangan sarana sekolah berupa tempat parkir, mushalla, aula, peralatan drum-band, pagar keliling sekolah, dan kursi siswa. Tenaga yang mengerjakan sarana fisik sekolah berasal dari wali murid.
- h. Orang tua murid merasa bangga dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka di sekolah. Mereka percaya dan mendukung karena perencanaan, pengadaan, dan kegiatan dilaksanakan secara terbuka, aspiratif, partisipatif, dan adil, karena iuran dikenakan pada orang tua siswa yang mampu saja. Mereka menyatakan akan mendukung kegiatan sejenis demi kebaikan sekolah di masa yang akan datang. Partisipasi yang dibangun tidak dinilai membebani mereka.

3. Strategi Pelibatan Partisipasi Masyarakat

- a. Perencanaan kegiatan partisipasi masyarakat dilaksanakan secara bertahap, pada tahap awal kepala sekolah dan ketua komite sekolah merumuskan rencana dan

- strategi implementasinya, lalu diundang pengurus inti untuk membahas rencana yang dimaksud, setelah disepakati oleh tim inti baru menghadirkan semua orang tua siswa untuk dibahas bersama dan disepakati bersama.
- b. Implementasi program sesuai dengan kesepakatan bersama tentang apa yang akan dilaksanakan, siapa yang terlibat melaksanakannya, berapa biayanya, darimana sumbernya, serta bagaimana menghimpun dan memanfaatkannya.
 - c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dilaksanakan secara kooperatif antara sekolah dan komite sekoah, laporan kemajuan diadakan pada rapat tengah tahunan, sedangkan penilaian keberhasilannya dilakukan pada akhir tahun, atau bergantung pada jangka waktu kegiatan yang disepakati.
 - d. Program partisipasi masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan dan telah memiliki bukti berupa wujud fisik yang direncakan dan keberhasilan yang diraih atas penggunaan fasilitas yang diadakan. Misalnya, fasilitas fisik berupa tempat parkir, aula, perangkat *drum-band*, kursi siswa, dan program yang sedang berjalan adalah pembangunan mushala. Sedangkan prestasi yang diraih berkat adanya pengadaan sarana pembelajaran antara lain mendapat juara *marching-band* se Kabupaten Rejang Lebong, dan mendapat predikat mayoret terbaik tingkat SMP. (Curup, 25-10-2013, Yeni Minarni, S.Pd).
 - e. Partisipasi Masyarakat Dalam *Focus Group Discussion*
Peserta FGD yang berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berjumlah 36 orang, pada umumnya bekerja sebagai **petani**. Berpenghasilan rata-rata kurang dari 1 juta rupiah. Mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan musola pada tahun 2013/2014, telah berhasil mewujudkan harapan siswa memiliki tim dan alat ***drum-band*** pada tahun 2012/2013 lalu, serta berhasil membangun aula, membeli kursi siswa pada tahun 2011/2012, serta tempat parkir roda dua dan roda empat. Untuk keperluan pembelian kursi orang tua siswa menghimpun iuran sebanyak 50.000 rupiah persiswa.
 - f. Sarana yang dimiliki sekolah belum lengkap, pagar keliling belum memadai, masih ada sisi-sisi sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk “kabur” atau melanggar disiplin, atau terbuka peluang bagi kejahatan terhadap aset sekolah, serta

lingkungan sekolah potensial untuk ditata, diserasikan dengan lingkungan sekitar sekolah, dan dioptimalkan pemanfaatannya, terutama pekarangan.

g. Aktifitas siswa untuk berkreasi, mengembangkan karakter, meningkatkan disiplin, dan meningkatkan prestasi akademik maupun prestasi non akademik masih terbuka peluang untuk dapat mengadakan pelibatan partisipasi masyarakat secara lebih intensif dan lebih bervariasi. Beberapa aktivitas yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain: *drum-band*, pramuka, PMR, polisi sekolah, kebun biologi, botani, dan sejenisnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prioritas Program Pengembangan Sekolah

Sekolah sasaran penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan prestasi akademik merupakan program prioritas mereka, urutan kedua peningkatan prestasi non akademik, serta peningkatan prasarana dan sarana pembelajaran, di urutan ketiga peningkatan profesionalitas guru dan kepala sekolah.

a. Peningkatan Prestasi Akademik

Prestasi akademik merupakan kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan, prestasi akademik adalah kulminasi dari berbagai input pendidikan, dan hasil proses pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas merupakan perpaduan dari guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, metode yang tepat, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam prosesnya, pendidikan harus mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama dari masyarakat pendukungnya, sebab pendidikan di sekolah diadakan merupakan perwujudan dari pemenuhan atas kebutuhan masyarakat untuk menciptakan agar anak-anak mereka menjadi lebih berbudaya ketika mereka keluar dari sistem pendidikan persekolahan, dan budaya masyarakat pada masa yang akan datang menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi masa lalu dan kini.

b. Peningkatan Prestasi Non-Akademik

Setali tiga uang dengan prestasi akademik, prestasi non akademik juga digandrungi oleh warga sekolah, dijadikan sebagai “triger” untuk memacu prestasi

sekolah. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mencapainya, ternyata mereka menunjuk bahwa kambing hitamnya adalah “sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang profesional”. Sehingga sering kita dengar keluhan, bagaimana mungkin sekolah ini akan mencapai prestasi baik, jumlah gurunya kurang, yang adapun kompetensinya belum sesuai standar, ditambah lagi dengan sarana yang seadanya. Lengkaplah “penderitaan” sekolah atas keterpurukan mutu prestasi akademik dan prestasi non-akademiknya. Jadi, prestasi akademik dan prestasi non-akademik baru akan hadir jadi kenyataan apabila faktor-faktor input pendidikan yang lain sudah dapat dipenuhi, sesuai dengan standarnya, atau bahkan melebihi dari standar yang telah ditetapkan.

c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembelajaran

Benar bahwa hampir di semua sekolah memiliki prasarana dan sarana pembelajaran yang kurang memadai, khususnya di Bengkulu. Hanya sekolah-sekolah yang pernah dijuluki sebagai rintisan sekolah bertarap internasional (RSBI) yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Sekolah model ini juga mendapat suntikan dana yang luar biasa, pendidik dan tenaga kependidikan yang rata-rata mumpuni, dan dengan peserta didik yang berasal dari kelas-kelas unggul, belum lagi dilihat dari lokasi sekolah dan sejarah sekolah, yang juga selalu menduduki peringkat teratas dalam berbagai poin keberhasilan. Kecuali bekas sekolah RSBI, sekolah-sekolah pada umumnya masih memerlukan sentuhan fisik yang tidak sedikit. Mulai dari gedung yang kurang, kondisinya yang buruk, hingga membuat pelajar dalam kondisi tidak nyaman untuk belajar dengan fasilitas pembelajaran yang apa adanya.

d. Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Hampir tidak ada kepala sekolah yang mempunyai optimisme yang tinggi, bahwa keberhasilan pendidikan amat bergantung pada profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka pada umumnya lebih yakin, bahwa dilatih dan dibina bagaimana-pun guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada akan tetap

seperti sekarang, sepulang pelatihan, mereka akan kembali pada kebiasaan lamanya, seperti rutinitas dulu, merubah diri dan merubah keadaan jadi mustahil dilakukan, sebab ada raja yang titahnya tidak bisa diabaikan, perintahnya harus ditaati, dan upetinya harus ditunaikan. Jika tidak, mutasi siap menanti, dan non-job segera terjadi. Sertifikasi yang pada awalnya dijadikan rujukan agar pendidikan lebih bermutu, mulai dipertanyakan akurasinya, sertifikasi tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa mutu pendidikan akan menjadi lebih baik. Jika betul demikian, darimana lagi kita memulai memperbaiki mutu pendidikan. Semua pihak mesti sependapat bahwa bagaimanapun caranya, prasarat bagi perbaikan mutu pendidikan mestilah berawal dari peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab ditangan merekaalah awalnya perubahan, ditangan mereka pula, masa depan anak bangsa, dan masa depan bangsa akan dihadirkan. Berhasil mereka, maka berhasil pembangunan, gagal mereka, maka akan gagal pula pembangunan, dan masa depan yang diidamkan hanya akan menjadi angan belaka.

2. Model Penguatan MBS yang Mengutamakan Partisipasi Masyarakat

Model MBS yang mengutamakan peran partisipasi masyarakat harus regulatif, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundungan yang berlaku, penyediaan pendanaan dan fasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Proses pendidikan di sekolah diarahkan untuk mengembangkan potensi sekolah, yang secara faktual dinyatakan dalam dokumen rencana strategis, rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja sekolah. Dalam mengembangkan potensi dan rencana harus berbasis aspirasi masyarakat, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang dianut. Dengan demikian proses pendidikan akan produktif karena mendapat dukungan dari masyarakat, dan sekolah akan mampu menghadirkan hasil pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Secara simpel, model penguatan Manajemen Sekolah yang mengutamakan partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut.



Sekolah akan produktif (dalam arti mampu menghadirkan hasil pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat, manakala sekolah mampu menjaring aspirasi masyarakat, mengemasnya dalam bentuk program-program unggulan sekolah, kemudian sekolah memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, agar semua fihak dalam masyarakat mendukung kegiatan sekolah secara produktif, efektif, dan efisien. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Dalam kasus SMP Negeri 1 Sindang Keligi, partisipasi masyarakat sangat berarti dalam pengadaan fasilitas pembelajaran, sehingga pembelajaran di sekolah menjadi semakin bermakna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil (1) mengidentifikasi potensi partisipasi masyarakat dalam bentuk potensi internal sekolah; dan (2) potensi ekonomi, sosial, budaya, dan agama; serta (3) mengembangkan model manajemen berbasis sekolah yang lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya siap untuk membantu memajukan sekolah, dengan catatan sekolah mesti melibatkan masyarakat pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Sekolah yang memperhatikan aspirasi masyarakat cenderung mendapat dukungan yang memadai dan dukungan program lanjutan, sebaliknya jika gagal mewujudkan kesepakatan maka mereka tak mau mendukung lagi. Tingkat sosial-ekonomi yang tinggi tidak menjamin partisipasi masyarakat jadi baik, sebaliknya meskipun berasal dari keluarga miskin ternyata dapat memberi dukungan yang berarti, manakala mereka dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi.

B. Saran

Diperlukan upaya penguatan kompetensi manajerial dan kewirausahaan kepala sekolah, serta penguatan unsur komite sekolah melalui bantuan pelaksanaan *focus group discussion* yang melibatkan unsur sekolah, komite sekolah, dan siswa. Penguatan mesti dilakukan dalam kerangka memadukan potensi sekolah, harapan masyarakat, dan daya dukung masyarakat guna menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan (2006). *Naskah akademik tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Bossert (2002). *Becoming a Good Principal: The First Years*. Paper Presented at the Annual Meeting of the Midsouth Educational Research Association, Little Rock USA.
- Cohen (1982). *The Principal and Staff Development in the S Cohen, 1982 High School*. New York: Bank Street College in Education.
- Crow & Paterson, (1998). *Improving School Public Relation Through Principal Leadership*. New York: Allyn and Bacon.
- Depdiknas (2006). *Petunjuk Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen*. Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, Jakarta.
- Fullan, MG (2000). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Imergart, Glen (1988). *Leadership and Leader Behavior, in Handbook of Research Educational Administration*. London: Longman
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.
- Leithwood dan Montgomery's (1998). *The Principal First Years: The Mutual Process of Developing Leadership*. *Educational Leadership*, 6 (6) 32-49.
- Manap, (2008), Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Laporan Penelitian, Program Magister Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu.
- Manap dan Puspa Juwita (2009), Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Bengkulu, Laporan Penelitian, Program Magister Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu.
- Manap, Sarwit, dan Boko Susilo, (2009), Pemetaan Potensi dan Masalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, Universitas Bengkulu.

Manap, dkk. (2010). Pemetaan Kompetensi Kepala SMP di Propinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga.

Manap, dkk. (2011). Penguanan Kompetensi Kepala SMP di Propinsi Bengkulu, Laporan Penelitian, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga.

Mulyasa (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Penerbit Alfabeta

NCREL, 1995, *Decentralization: Why, How, and Toward What Ends?* NCREL's Policy Briefs, report 1, 1993 dalam Nuril Huda "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.

Oteng Sutisna (1996). *Administrasi Pendidikan. Petunjuk Praktis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

Lampiran-1

IV. BIODATA PENELITI

1. Identitas Diri

- | | | | |
|------|--------------------------|---|--|
| 1.1 | Nama Lengkap | : | Dr. Manap, M.Pd. |
| 1.2 | Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| 1.3 | NIP | : | 131604515 |
| 1.4 | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Bogor, 20 Mei 1959 |
| 1.5 | Alamat Rumah | : | Jalan Pepaya No. 97 Bengkulu |
| 1.6 | Nomor Telepon/Fax | : | 0736-27151 / 0736-26469 |
| 1.7 | Nomor HP | : | 0811733454 |
| 1.8 | Alamat Kantor | : | FKIP Universitas Bengkulu |
| 1.9 | Nomor Telepon/Fax | : | 0736-21170 |
| 1.10 | Alamat E-mail | : | msomantri@yahoo.com |
| 1.11 | Mata kuliah yang diampu | : | 1. Anatomi Manajemen Pendidikan
2. Perencanaan Pendidikan
3. Manajemen SDM Pendidikan
4. Manajemen Keuangan Pendidikan
5. Profesi Kependidikan |

2. Riwayat Pendidikan

2.1 Program	S1	S2	S3
2.2 Nama PT	IKIP Bdg	IKIP Bdg	IKIP Bdg
2.3 Bidang Ilmu	Adm.& Sup Pendidikan	Administrasi Pendidikan	Administrasi Pendidikan
2.4 Tahun Masuk	1979	1990	1993
2.5 Tahun Lulus	1983	1993	1999
2.6 Judul KT	Efektivitas Diklat Pra Jabatan	Penyebab Putus Sekolah & Penuntasan Wajar Dikdas	Penuntasan Wajar dan Peningkatan Mutu Dikdas
2.7 Nama Pemb.	Rifai.MA/ J.Mamusung	Prof.Abin. S. Prof.Jam'an S	Prof. A.Sanus Prof. Abin S. Prof. Engkoswara

3. Pengalaman Dalam Penelitian dan Pembuatan Karya Tulis

- 1) Identifikasi aspirasi studi dan profesi pekerjaan pada siswa SMA di Kotamadya Bengkulu, Dana DIP-UNIB, 1990;
- 2) Penelusuran penyebab rendahnya tingkat melanjutkan dan implikasinya bagi penuntasan wajib belajar di Kabupaten Bogor, Dana TMPD, Tesis, 1993;
- 3) Analisis kesulitan memasuki lapangan kerja bagi lulusan SMKTA di Propinsi Bengkulu, Dana DIP-UNIB, 1994;
- 4) Model penerapan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun pada daerah terpencil di Propinsi Bengkulu, Penelitian Hibah Bersaing, 1995;
- 5) Uji coba model penerapan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun pada daerah terpencil di Propinsi Bengkulu, Penelitian Hibah Bersaing, 1996;
- 6) *The Empowerment of the School Planning and Management Sistems to Improve the Quality of School Performances* ; Prof. Dr. Abin Syamsuddin, M.A. (PI) PPS IKIP Bandung; URGE Batch-III, 1998-2001);
- 7) Efektivitas manajemen kerjasama antara Universiti Teknologi Malaysia dengan Kolej Legenda Langkawi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Malaysia, Penelitian Kerjasama antar Lembaga. 2002.
- 8) Kontribusi peran Guru Bantu Sementara dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah penerima GBS Propinsi Bengkulu, BEP., Tahun 2003.
- 9) Efektifitas pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah, Penelitian dan Pengembangan BEP, Jakarta, 2005.
- 10) Revitalisasi Manajemen Pembinaan KKG/MGMP di Propinsi Bengkulu, Pendampingan kajian Peningkatan Mutu Layanan LPMP Bengkulu, 2006.
- 11) Analisis Strategi Sekolah Dalam Menghadapi Ujian Nasional berdasarkan Analisis Hasil Ujian Nasional SMA Se Propinsi Bengkulu Tahun 2006.
- 12) Revitalisasi Pengelolaan Kelompok Kerja Guru SD di Bengkulu, Tahun 2007.
- 13) Revitalisasi Pengelolaan MGMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2007.
- 14) Analisis Dampak Pemberian Biaya Operasional Sekolah pada SD dan SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2008.
- 15) Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bengkulu, 2008.
- 16) Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, 2008.
- 17) Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Bengkulu, 2009
- 18) Pemetaan Potensi dan Masalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Bengkulu, 2009.
- 19) Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah di Provinsi Bengkulu, Penelitian Kerjasama Antara LP UNIB dengan LPMP Provinsi Bengkulu, Tahun 2010.
- 20) Peguatan Kompetensi Kepala Sekolah di Provinsi Bengkulu, Penelitian Kerjasama Antara LP UNIB dengan LPMP Provinsi Bengkulu, Tahun 2011.
- 21) Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah di Kota Bengkulu. Penelitian Penunjang Pengajaran Perencanaan Pendidikan Program MMP, 2011.

4. Pengalaman Pengabdian

- 1) Konsultan Pengembangan Model Pelayanan Pendidikan Berbasis Asrama dan Model Pengelolaan Kerjasama antara Perguruan Tinggi Negeri (UTM) dengan Kolej Legenda di Langkawi, Malaysia, Tahun 1999 – 2002.
- 2) Konsultan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (BEP) Propinsi Bengkulu, Tahun 2003-2004.
- 3) Konsultan Pendidikan, Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (BEP-II), Diektorat PLP, Mandikdasmen, Jakarta, Januari – Juni 2006.

- 4) Konsultan Pendidikan, LPMP Bengkulu, Juli – Desember 2006.
- 5) Konsultan Pendidikan, LPMP Bengkulu, Januari – Desember 2007.
- 6) Konsultan Manajemen BOS Provinsi Bengkulu Tahun 2008.
- 7) Instruktur PLPG Pendidikan Guru SD. FKIP UNIB. Tahun 2008-2009
- 8) Instruktur PLPG Kepengawasan Sekolah. FKIP UNIB. Tahun 2010-2011.
- 9) Asesor Sertifikasi Dosen Bidang Ilmu Pendidikan. Tahun 2010-2012
- 10) Instruktur PLPG Pendidikan Guru SD FKIP UNIB. Tahun 2012

**Bengkulu, 22 Juni 2013
Dr. M a n a p, M.Pd.
NIP. 19590520 1986031001**